

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

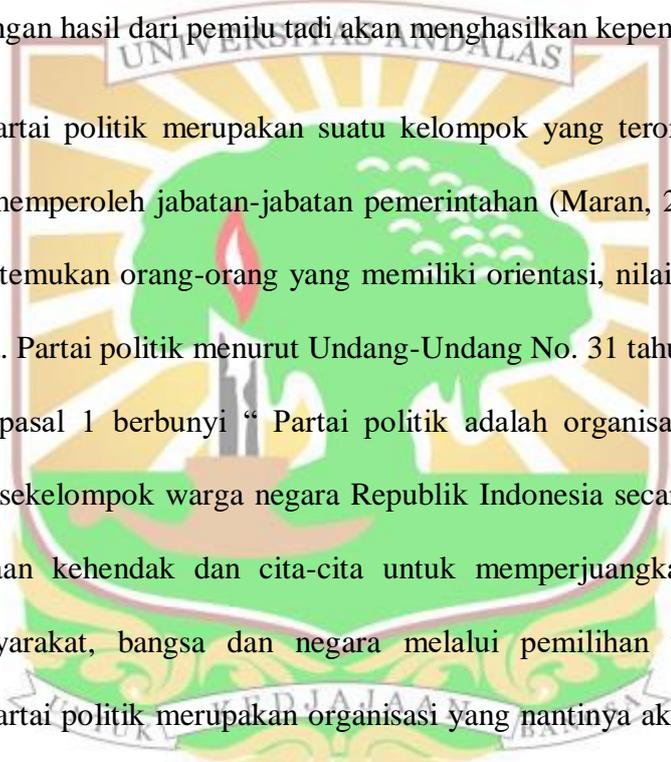
Indonesia sebagai negara demokrasi telah melalui perjalanan dengan berbagai proses dan penuh dinamika. Jika dilihat dari periode tahun-tahun sebelumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjalankan demokrasi yang diantaranya kebebasan amandemen UUD 1945, kebebasan lembaga pers, adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi perubahan besar ketika berubahnya era orde baru menjadi era reformasi adalah membuka ruang bagi sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif.

Salah satu bentuk dari perubahan tersebut adalah hadirnya partai politik sebagai wujud dari kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dan ini yang menjadi ciri utama negara sedang menjalankan sistem demokrasi (Jafar, 2017). Partai politik yang akan memainkan peran sebagai suatu prasyarat untuk jalanya suatu negara yang menganut paham demokrasi. Erat kaitannya antara demokrasi dengan kehadiran partai politik.

Keberadaan partai politik yang baik dan fungsional harus selalu diupayakan oleh para anggotanya. Partai politik yang baik dan fungsional akan menciptakan kontrol sosial yang baik, dan bisa mengatasi berbagai konflik yang terjadi dimasyarakat. Sebagai sebuah kelompok yang terorganisir, partai politik

harus dapat memainkan peran untuk bisa menguasai pemerintahan dan akan menjalankan kebijakan umum melalui pemilihan umum.

Setiap 5 tahun sekali Indonesia mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum (pemilu) yang akan diikuti oleh partai-partai politik. Hasil dari pemilu akan sangat mempengaruhi kondisi politik yang ada di Indonesia. Itu sebabnya peranan partai politik akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita karena dengan hasil dari pemilu tadi akan menghasilkan kepemimpinan baru.



Para partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan (Maran, 2001). Di partai politik akan ditemukan orang-orang yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pasal 1 berbunyi “ Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”. Dapat disimpulkan partai politik merupakan organisasi yang nantinya akan memberikan perubahan dalam masyarakat atau negara.

Dengan adanya pertumbuhan dan kematangan kondisi politik dan sosial sejak awal abad ke 20 terutama setelah kemerdekaan membuat kelompok-kelompok masyarakat yang belum terorganisir menjadi sebuah kelompok yang terorganisir dan menjadi kelompok kepentingan. Salah satu bentuk kelompok kepentingan tersebut adalah partai politik. Partai politik akan mengikuti pola

struktur dari watak atau karakteristik di dalam sebuah masyarakat, bahkan juga negara (Jafar, 2017).

Dalam perjalanan partai politik tidak pernah bisa dipisahkan dari karakteristik masyarakat yang ada. Orientasi ideologi, pola struktur, sampai pada cara berorganisasi pada partai politik biasanya mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Termasuk juga didalamnya struktur internal partai dan pola kepemimpinan akan mencerminkan sistem sosial yang berlaku bisa bersifat hierarkis, demokratis, atau kolektif.

Dapat juga kita perhatikan adanya perubahan wajah politik dari pemilu ke pemilu selanjutnya. Dari momen pemilu menunjukkan bagaimana prefensi politik masyarakat mengalami pergeseran. Itu sebabnya partai politik harus senantiasa melakukan pembaruan strategi, dan dapat memperluas jaringan. Setiap partai politik memang harus bisa menyesuaikan diri agar selalu bisa relevan sesuai kondisi masyarakat.

Maka akan kita jumpai pada perjalanan partai politik yang mana ketika pemilu di tahun 1955 PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai paling besar dan dikenal sebagai partai yang menandai kekuatan nasionalisme. Dilanjutkan dengan Partai Masyumi sebagai partai yang berhaluan Islam modernis. Lalu setelah itu Partai Nahdatul Ulama yang mempresentasikan kalangan Islam tradisional. Semua partai tadi mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat.

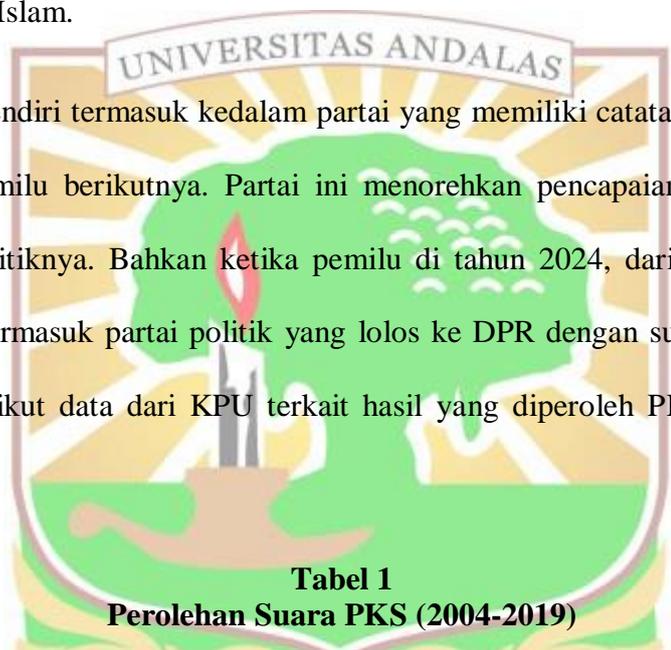
Akan ada partai-partai lain seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mewakili ideologi kiri. Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang membawa gagasan sosialis, dan Partai Buruh juga termasuk. Ada partai yang berbasis agama seperti Partai Kristen Indonesia (Parkindo) mewakili aspirasi politik umat Kristen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung nilai-nilai keislaman dalam partainya. Ada beragam partai politik yang turut mewarnai perpolitikan di Indonesia.

Setiap partai politik akan hadir dengan karakteristik yang berbeda dan membawa ideologi masing-masing sebagai landasan dalam menjalankan partainya. Ideologi tersebut yang akan menjadi arah bagi partai-partai dalam menjalankan strategi politik. Dalam negara demokratis keberagaman ideologi dapat memberikan contoh dari dinamika politik yang sehat karena memberi ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terwakili secara adil.

Salah satu partai yang memiliki identitas ideologi yang kuat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS dikenal sebagai partai berideologi Islam. PKS merupakan aktivis dakwah *Tarbiyah* yang berafiliasi politik. PKS lahir dari gerakan dakwah *tarbiyah* beberapa kampus di Indonesia dan bisa dipahami sebagai alternatif dari gerakan Islam (Arrasyid, dkk, 2020). Dalam aktivitas politiknya PKS mengusung nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, dan sangat menekankan pentingnya keadilan sosial, moralitas, dan pemberdayaan masyarakat.

PKS merupakan partai yang memiliki program pengabdian masyarakat yang luas dan berkelanjutan. Dilihat dari partisipasi dalam bentuk mulai dari bantuan darurat untuk para korban bencana alam, menyediakan layanan medis gratis untuk masyarakat miskin (Alamsyah, Hendra, 2023). Bentuk program ini tidak hanya menjadi bagian dari strategi politik, melainkan wujud nyata dari penanaman nilai solidaritas dan kepedulian sosial dari identitas ideologi PKS sebagai partai Islam.

PKS sendiri termasuk kedalam partai yang memiliki catatan baik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Partai ini menorehkan pencapaian positif dalam perjalanan politiknya. Bahkan ketika pemilu di tahun 2024, dari hasil Bawaslu (2024) PKS termasuk partai politik yang lolos ke DPR dengan suara 12.781.353 (8,42%). Berikut data dari KPU terkait hasil yang diperoleh PKS dari pemilu 2004-2019.



**Tabel 1**  
**Perolehan Suara PKS (2004-2019)**

<b>Pemilu (Tahun)</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
2004	8.149.457	7,20	45
2009	8.204.946	7,89	57
2014	8.480.204	6,79	40
2019	11.493.663	8,21	50

Sumber: kpu.go.id

Dengan ideologi Islam yang kuat PKS tidak hanya menonjol pada hal politik saja, tetapi termasuk menerapkan nilai keagamaan pada kehidupan anggotanya. Di PKS terdapat tradisi yang sudah turun temurun dilakukan yaitu,

menikah dengan praktik *ta'aruf*. *Ta'aruf* merupakan proses pengenalan sebelum memutuskan untuk menikah yang akan dibantu melalui perantara (mediator). Pengenalan baik itu mengenal latar belakang, sosial budaya, pendidikan, keluarga ataupun agama. Meskipun tidak dalam aturan tertulis, dari forum Unit Pembinaan Anggota (UPA) menganjurkan setiap anggota untuk menikah dengan proses *ta'aruf*.

Di PKS bahkan terdapat sebuah lembaga yang memfasilitasi untuk anggota atau binaan yang mau menikah. Lembaga yang mengurus hal tersebut adalah BPKK atau Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. BPKK memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Islami bisa terjaga selama proses pencarian jodoh, pertemuan *ta'aruf*, sampai pernikahan. Setiap anggota yang mau menikah akan diproses terlebih dahulu melalui pembina (*Murobbi/ah*) masing-masing dan akan dibantu sampai proses akhir yaitu, pernikahan.

Gambaran awal dari proses *ta'aruf* dimulai dari anggota yang sudah punya rencana menikah, lalu disampaikan ke pembina. Dari pembina akan mengarahkan anggota untuk membuat biodata atau *curriculum vitae* (CV). Dengan cv tadi para pembina akan mencarikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan setelah itu akan diadakan pertemuan *ta'aruf*. Selama pertemuan tersebut akan dibersamai dengan pembina atau orang yang dikenal dan dipercaya.

*Ta'aruf* memiliki tujuan agar para calon saling mengenal satu sama lain baik secara fisik maupun non-fisik. *Ta'aruf* sendiri merupakan cara memilih atau mengenal calon pasangan yang telah diatur oleh syariat Islam. Hal ini sesuai

dengan PKS sebagai partai yang berasaskan Islam sehingga senantiasa berusaha untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam partai. Praktik *ta'aruf* ternyata memang bukan hanya fenomena individual melainkan sudah menjadi identitasnya tersendiri.

Dengan adanya fenomena *ta'aruf* di partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Dapat kita ketahui beberapa partai politik pada umumnya tidak begitu ikut campur untuk permasalahan atau urusan pribadi dari anggotanya, tetapi PKS ternyata memiliki perhatian khusus terhadap pernikahan anggotanya, bahkan ada lembaga tersendiri yang mengurus hal tersebut. Oleh karena itu, atas dasar ini yang membuat penulis melakukan penelitian ke PKS

## **B. Rumusan Masalah**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang memiliki ideologi kuat Islam. PKS sebagai partai yang berasaskan Islam mencoba menerapkan nilai-nilai keagamaan pada partainya. Termasuk didalamnya adalah urusan pernikahan dari anggota PKS. Meski tidak dalam aturan tertulis, setiap anggota yang mau dan siap untuk menikah akan diproses dan menggunakan cara *ta'aruf*. *Ta'aruf* dianggap sebagai sarana yang syar'i dan lebih menjaga kesucian niat dalam proses mencari pasangan hidup.

Untuk mendukung hal tersebut, PKS memiliki lembaga yang mengurus pernikahan anggota. Melalui para pembina dari masing-masing anggota, bagi yang siap menikah akan diarahkan dan dibimbing untuk menjalani proses *ta'aruf*.

Berdasarkan fenomena yang ada di PKS tersebut, sangat perlu rasanya dikaji terkait penerapan *ta'aruf* yang ada disana. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik dan memunculkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah:

1. Apa arti *ta'aruf* bagi Partai Keadilan Sejahtera?
2. Bagaimana mekanisme praktik *ta'aruf* yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera?
3. Apa fungsi dan manfaat *ta'aruf* yang dilakukan di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera?

### C. Tujuan Penelitian

Maka dengan itu penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi arti *ta'aruf* bagi Partai Keadilan Sejahtera.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme *ta'aruf* yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.
3. Untuk mendeskripsikan fungsi dan manfaat praktik *ta'aruf* yang dilakukan di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera

### D. Manfaat Penelitian

Tentu dari penelitian ini diharapkan ada beberapa manfaat yang akan didapatkan baik untuk penulis sendiri maupun bagi yang membaca. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat secara akademis:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan praktik sosial, terkhususnya praktik *ta'aruf*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi yang memiliki tema serupa, seperti pernikahan dalam komunitas.

2. Manfaat secara praktis:

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan model pernikahan yang berbasis nilai agama, dan mungkin bisa diadaptasi oleh komunitas lain yang memiliki kesamaan nilai. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dapat mengedukasi dan memberi paham bahwa praktik *ta'aruf* dalam komunitas politik tidak hanya sekedar formalitas melainkan punya nilai dan fungsi sosial tertentu

**E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian tentu peneliti harus melakukan kajian literatur dari penelitan terdahulu sebagai bahan acuan dan sumber informasi. Banyak kajian atau penelitian terkait fenomena partai politik, pernikahan, dan *ta'aruf* itu sendiri. Berikut merupakan beberapa penelitian yang cukup dekat dengan topik penelitian dan dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian.

Pertama, skripsi dari mahasiswa Departemen Sosiologi Universitas Andalas yang bernama Rahma Hayati Harahap dengan judul "*Praktik Sosial Seleksi Jodoh (Mate Selection) Menggunakan Metode Ta'aruf*" tahun 2017. Pada penelitian ini membahas terkait dari pengalaman anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait *ta'aruf* dan berfokus kepada praktik sosial seleksi jodoh

dengan menggunakan metode *ta'aruf*. PKS selaku partai yang mencantumkan syariat Islam sebagai dasar organisasi maka segala urusan disesuaikan dengan syariat-syariat yang telah diberlakukan. Bahkan untuk urusan perkawinan, para anggota dianjurkan menikah dengan cara *ta'aruf*. Terdapat beberapa aturan yang telah dibuatkan PKS dalam proses *ta'aruf* hingga lanjut kejenjang perkawinan.

Salah satu fungsi dari PKS menerapkan aturan menikah dengan ajaran Islam adalah untuk membentuk keluarga Islami. Bagi para anggota PKS *ta'aruf* dianggap sebagai cara mengenal pasangan yang lebih baik dan mendapatkan pasangan satu pemikiran. Memang dari anggota PKS sendiri juga menitikberatkan kriteria pasangan berdasarkan agama.

Kedua, artikel dari Muhammad Mu'min Mushonaf Prodi Magister, Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN Mataram yang berjudul "*Praktik Nikah Tanpa Pacaran di Lingkungan Anggota Pelopor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pengaruhnya terhadap Harmoni Rumah Tangga*". Diterbitkan di JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 5, Nomor 11, November 2022. Pada jurnail ini membahas terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki lembaga pernikahan sebagai sarana untuk anggota PKS yang ingin melangsungkan pernikahan sebagai sarana untuk anggota PKS yang ingin menikah. Di PKS rata-rata menganjurkan kepada anggotanya jikalau sudah memenuhi syarat untuk menikah maka disegerakan untuk melangsungkan pernikahan. Untuk proses pernikahan dalam pencarian pasangan sangat diutamakan tanpa pacaran atau dikenal dengan namanya *ta'aruf*.

*Ta'aruf* adalah proses pendekatan atau perkenalan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang baik dan dengan akhlak yang benar, didalamnya terdapat aturan yang akan melindungi kedua pihak dari pelanggaran berperilaku buruk atau maksiat. Dari praktik *ta'aruf* ternyata juga memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota dari PKS dapat disimpulkan bahwa rumah tangga anggota PKS dapat dikatakan rumah tangga yang harmonis.

Ketiga, artikel dari Rizqa Hidayati dengan judul "*Ta'aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru*" yang mengkaji fenomena *ta'aruf* yang ada pada kalangan kader PKS di Pekanbaru. Terdapat banyaknya kekhawatiran dari cara menjemput pasangan menuju pernikahan, yakni dengan cara berpacaran (dinilai cukup memberikan dampak negatif, salah satunya kerusakan moral) maka dengan hadirnya proses *ta'aruf* bisa menjadi salah satu wadah untuk mengurangi/menghindari kerusakan moral bangsa. Ketika moral bangsa rusak itu pertanda rusaknya suatu negara.

*Ta'aruf* yang akan dibahas adalah proses *ta'aruf* itu sendiri dari proses perkenalan, sampai dengan menuju pernikahan. Terdapat sebuah fenomena *ta'aruf* di partai politik yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jadi PKS mendorong kader untuk melaksanakan pernikahan secara *ta'aruf* dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Salah satu tujuannya agar terdapat budaya pergaulan syar'i.

Tentu dasar awal PKS mendorong kadernya menikah dengan *ta'aruf* karena memang sebagai partai yang berideologi Islam jadi tentu menikah sesuai dengan yang telah disyariatkan. Terdapat pemaknaan *ta'aruf* bagi para kader PKS, yaitu pelaksanaan syariat Islam, sebagai media mengenal pasangan, dan kontrol sosial untuk menghindari pelanggaran syariat.

Keempat, artikel dari Hani Aufaa Khairunnisa, Irsan dengan judul “*Ta'aruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah*”. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol. 16, no. 2 September 2022. Artikel ini membahas tentang pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan dengan cara yang baik dan halal nantinya terbalut dalam satu ikatan dengan tujuan yang mulai yaitu, menjauhi maksiat dan mendekatkan diri ke Allah.

Kurang lebih pembahasan artikel ini terkait *ta'aruf* serta *ta'aruf* menurut perspektif dari pendakwah ustadz Khalid Basalamah. Pengenalan atau biografi ustadz Khalid Basalamah dipaparkan disini. Sedangkan *ta'aruf* perspektif ustadz adalah proses kenalan para calon pasangan dengan ditambahkan kata “syar’i” agar tidak menyamakan pacaran dengan *ta'aruf*. Pacaran dan *ta'aruf* sangatlah berbeda. Pernikahan sendiri merupakan ibadah paling panjang maka harus ada tujuan yang jelas, itu sebabnya tahapan yang harus dilakukan adalah *ta'aruf*. *Ta'aruf* dapat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kelima, artikel dari M. Alpi Syahrin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ *Peran Partai Politik dalam Demokrasi*

*Perwakilan*” yang diterbitkan di Jurnal Eksekusi, vol. 2 No. 2 Desember 2020. Pada jurnal ini akan membahas sejarah dari sebuah dasar hukum, dan terjadinya suatu negara. Berdasarkan teori JJ. Rousseau bahwa sebuah negara bersandar atas kemauan rakyat, dan sama halnya dengan segala aturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat.

Terdapat sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung sebagai hasil dari kemauan atau suara rakyat. Dalam praktiknya yang akan menjalankan adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih pada lembaga perwakilan rakyat biasa disebut parlemen. Sistem pemerintahan dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan merupakan hasil dari wakil-wakil yang akan diawasi oleh rakyat dalam pemilu. Ketika pemilu terdapat kebebasan sipil dan politik, dan partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat penting.

Partai akan menjadi penghubung antara pemerintahan dengan rakyat. Bahkan terdapat tokoh bernama Schattscheider yang berkata “ *Political parties created democracy*”, partai politik yang menentukan demokrasi. Partai politik memiliki peran sebagai pemberi ide, pikiran, pandangan hingga keyakinan yang nantinya akan menentukan kebijakan sebuah negara. Selain dari itu partai politik juga dapat memberhentikan wakil rakyat.

Keenam, artikel dengan judul “*Rekrutmen dan Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang*” yang ditulis oleh Resti Mutia Azri. Artikel ini diterbitkan oleh JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal) Vol.1 Nomor 2, Oktober 2019. Pada artikel ini membahas

tentang proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang.

PKS sendiri menggunakan dua cara pendekatan dalam rekrutmen. Pertama, pola rekrutmen individual atau disebut (*al- da'wah al-fardhiyyah*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara per-orangan atau komunikasi secara langsung dengan salah seseorang. Calon-calon anggota tersebut nanti akan diajak untuk ikut dalam serangkaian forum dan pelatihan yang diadakan oleh PKS. Kedua, pola rekrutmen institusional (*al- da'wah al- amah*) yaitu bentuk rekrutmen institusional yang melibatkan struktur formal PKS ataupun organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKS melalui kegiatan seperti kegiatan sosial, pengajian umum, atau tabligh akbar.

Sedangkan kaderisasi atau pengkaderan dari PKS sangat berbeda dari partai lainnya. Bagi PKS kaderisasi adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan untuk keberlanjutan partai. Ada berbagai macam kegiatan untuk kaderisasi PKS, dan terdapat tingkatan untuk level kaderisasi. Para anggota harus mengikuti TOP (*Training Orientasi Partai*) 1, baru lanjut ke TOP 2 sampai nantinya memasuki Taklim Rutin Partai (TRP). Proses kaderisasi tersebut harus dilakukan agar para anggota dapat memahami situasi organisasi maupun visi dan misi organisasi.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Demokrasi merupakan sistem politik yang dalam perjalanannya mengalami berbagai bentuk dan modifikasi sesuai dengan konteks politik, sosial,

dan sejarah suatu bangsa. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata *demos* yang artinya adalah rakyat, dan *krator/kratein* yang artinya adalah kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi juga telah mengalami banyak perkembangan, baik secara substansi ataupun dalam implementasinya. Dalam sejarah Indonesia, sistem demokrasi telah melalui berbagai fase, yaitu Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan demokrasi pascareformasi. (Budiarjo, 2007).



Indonesia sendiri menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, yang dirancang sebagai sistem politik yang menyesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kepribadian nasional. Demokrasi Indonesia, dalam praktiknya harus senantiasa mengalami proses pembelajaran dan pembenahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, terdapat dua prinsip pokok yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) yang artinya negara Indonesia berdasarkan atas Hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*), dan Sistem Konstitusional yang berarti pemerintahan berdasarkan sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hasil permusyawaratan perwakilan yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun ternyata setelah tertumpasnya G 30

S/PKI pada tahun 1965 yang kita cita-citakan adalah demokrasi konstitusional tetapi tidak dapat disangkal pada Demokrasi Terpimpin kita cukup terpengaruh dengan konsep komunisme dalam kehidupan politik sehingga konsep demokrasi cukup berubah (Budiarjo, 2007).

Ditambah terjadinya reformasi politik maka Indonesia sepakat melakukan demokratisasi kembali. Proses pendemokrasian sistem politik Indonesia membuat kebebasan rakyat terbentuk, ditegakkannya kembali kedaulatan rakyat. Terdapat pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Berbicara terkait demokrasi maka tidak akan lepas dari yang namanya peran Partai Politik. Partai politik sangat mewarnai dunia politik di Indonesia. Partai politik awalnya lahir dari negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Perancis. Awalnya kegiatan politik dipusatkan kepada kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang mana tujuannya untuk mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.

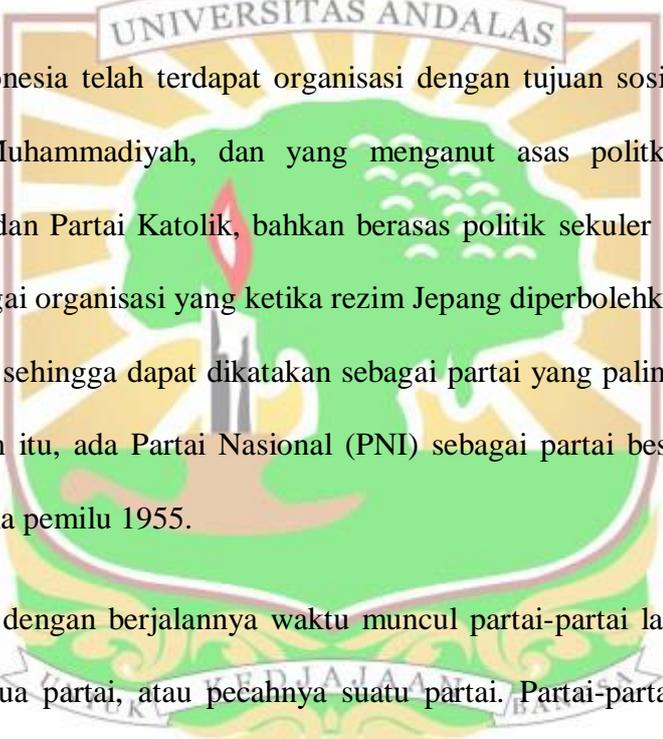
Kegiatan politik semakin berkembang bahkan diluar parlemen dengan terbentuknya panitia pemilihan yang mengatur suara para pendukungnya menjelang pemilihan umum. Efek dari banyak pendukung dari tiap golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen mulai berusaha untuk mengembangkan organisasi massa. Maka di akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang nantinya akan menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Definisi partai politik dari Budiarto (2007) adalah sekelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, bahkan memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk bisa melaksanakan programnya. Menurut beberapa tokoh seperti Giovanni Sartori, partai politik itu berarti suatu kelompok politik yang akan ikut pemilu dan dari pemilu akan menempatkan calon-calon yang akan menduduki jabatan publik. Sedangkan Neumann (dalam Budiarto, 2007 : 404) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.

Dalam sebuah negara yang memakai sistem demokrasi partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik, yang akan menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik, yang akan menjelaskan terkait fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat.
3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik, yang akan mengajak dan mencari orang yang bisa aktif pada kegiatan politik sebagai anggota partai.
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik, yang akan menjaga dan mengatasi konflik yang terjadi.

Partai politik dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal yang mana hanya satu partai yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan, sistem dwi-partai yang artinya terdapat dua partai yang mendominasi dan memiliki kedudukan, terakhir sistem multi-partai yang Indonesia sendiri memakai sistem ini. Terdapat keanekaragaman budaya politik di Indonesia, adanya perbedaan tajam antara agama, ras, atau suku bangsa yang mendorong untuk membuat suatu kelompok (Budiarjo, 2007).



Di Indonesia telah terdapat organisasi dengan tujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, dan yang menganut asas politik/agama seperti Sarekat Islam dan Partai Katolik, bahkan berbasis politik sekuler (PNI dan PKI). Masyumi sebagai organisasi yang ketika rezim Jepang diperbolehkan mengadakan kegiatan sosial sehingga dapat dikatakan sebagai partai yang paling besar di awal revolusi. Selain itu, ada Partai Nasional (PNI) sebagai partai besar dan pemilih terbanyak ketika pemilu 1955.

Seiring dengan berjalannya waktu muncul partai-partai lain, bisa dengan penggabungan dua partai, atau pecahnya suatu partai. Partai-partai hadir dengan berbagai macam alasan. Seperti salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS awalnya dimulai dari gerakan *Tarbiyah* dari beberapa kampus di Indonesia. Setelah terjatuhnya Soeharto pada 1998, maka banyak pembentukan partai baru dan pada 20 Juli 1998 lahirlah Partai Keadilan (PK) hingga ditahun 2002 bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS sebagai partai dakwah yang ingin memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan bernegara. PKS memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang berdasarkan nilai-nilai Islam. PKS cukup dikenal dengan sistem kaderisasinya dengan adanya pembinaan intensif melalui *Tarbiyah* (pembinaan). *Tarbiyah* dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil atau sering disebut UPA (Unit Pembinaan Anggota). Pada kelompok kecil inilah terdapat semacam penganjuran kepada para anggota terkait pernikahan. Jadi setiap anggota yang ingin menikah harus dengan syariat Islam yaitu, melalui *ta'aruf*. Bahkan terdapat lembaga yang memfasilitasi praktik tersebut sehingga praktik *ta'aruf* sudah menjadi ciri khas dari PKS itu sendiri.

Islam terdapat syariat yang berkaitan tentang perkawinan. Namanya adalah *ta'aruf*. Dari Mudhlor (t:t 1283) *ta'aruf* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengenal, dan mengetahui. *Ta'aruf* merupakan sebuah proses perkenalan untuk mengetahui calon pasangan baik itu mengenal dalam agama ataupun akhlak. Ketika proses *ta'aruf* para calon diperbolehkan melakukan interaksi dengan syarat tidak boleh ada *khalwat* (berdua) dan senantiasa menjaga topik pembicaraan agar selama proses tersebut terjaga dari perbuatan yang haram. Pencarian individu terhadap pasangan melalui cara *ta'aruf* dengan proses-proses yang ada dan dijalankan dapat memberikan nilai-nilai yang nantinya memberikan makna kehidupan pada individu dan menumbuhkan komitmen dalam pernikahan (Desiningrum, 2015).

*Ta'aruf* sangat dianjurkan karena kita sangat memerlukan perkenalan dengan calon pasangan baik dengan melihat agama dan akhlaknya. *Ta'aruf*

sendiri dapat disebut sebagai praktik sosial dalam konteks budaya dan agama Islam. Praktik sosial merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang mana mencerminkan norma ataupun nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat tersebut. Koentjaraningrat mendefinisikan praktik sosial sebagai perilaku yang berulang-ulang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat yang mencerminkan norma-norma yang berlaku, adat istiadat, dan tradisi. Praktik sosial mencakup tindakan sehari-hari yang berfungsi untuk memelihara kohesi sosial dan identitas budaya (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan teori Struktural Fungsional dari A.R Radcliffe Brown untuk dapat memahami praktik *ta'aruf* dalam komunitas politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Radcliffe Brown termasuk kedalam tokoh yang memiliki gagasan tentang fungsi. Dalam pandangannya, pemikiran tentang fungsi didasarkan kepada pemikiran bahwa budaya sebagai suatu mekanisme adaptif yang membuat manusia mampu menjaga kehidupan sosial sebagai suatu komunitas yang teratur. Jadi, setiap kebiasaan dan keyakinan suatu masyarakat memainkan beberapa bagian peran yang menentukan dalam kehidupan komunitas (Adam, 1983).

Radcliffe Brown juga memandang bahwa setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang menopang keberlangsungan struktur sosial secara keseluruhan (Koentjaraningrat, 2009). Setiap lembaga tidak berdiri sendiri, melainkan semuanya saling terhubung dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mempertahankan keteraturan sosial. Oleh karena itu,

menurut Radcliffe Brown harus memiliki pemahaman tentang setiap unsur sosial berfungsi dalam mendukung keseluruhan sistem sosial.

Dengan menggunakan pendekatan teori struktur fungsional, kita dapat melihat bahwa praktik *ta'aruf* merupakan bagian dari sistem sosial dan politik dari internal PKS. Praktik *ta'aruf* itu tidak berdiri sendiri, melainkan juga berfungsi dengan struktur komunitas, seperti norma, kontrol sosial, dan pembinaan ideologi. *Ta'aruf* dapat kita lihat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat solidaritas antar anggota, serta melestarikan nilai-nilai yang telah dipegang oleh PKS.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada komunitas politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di Sumatera Barat, tepatnya berlokasi di Jalan KIS. Mangunsarkoro, Jl. Anggur Kelurahan No. 34B, Jati Baru, Kecamatan Padang Timur. Lokasi ini dipilih sebagai titik awal untuk melaksanakan penelitian. Dari lokasi awal ini, proses penelitian akan dilanjutkan sesuai dengan arahan dari pihak PKS sesuai dengan yang telah direkomendasikan.

Adapun alasan memiliki PKS di Kota Padang sebagai objek penelitian didasarkan beberapa alasan. Pertama, Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang itu berarti berfungsi sebagai pusat pemerintahan, dan aktivitas sosial masyarakat. Kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang masuk ke dalam lima besar partai politik terkuat di Kota

Padang (Sumber: Databoks). Hal ini menunjukkan PKS memiliki pengaruh yang cukup besar di Kota Padang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan, yaitu studi kasus. Metode kualitatif menurut Koentjaraningrat (1983) adalah penelitian di bidang kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara masyarakat, tingkah laku atau kelakuan, fakta-fakta alam dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sehingga memang dibutuhkan data sedalam-dalamnya.

Penelitian dengan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus (Creswell, 2007). Kasus di sini adalah suatu kejadian, kegiatan, program, orang, atau proses. Untuk bisa memahami permasalahan secara mendalam, peneliti harus bisa melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap kasus-kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Tujuan dari adanya penelitian studi kasus adalah untuk mengungkapkan kekhasan dari kasus yang diteliti. Dengan adanya kasus itu sendiri itu merupakan penyebab dilakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, fokus utama dan tujuan dari

penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus, baik itu sejarah, kegiatan, fungsi, kondisi, atau hal lainnya yang berkaitan dengan kasus harus diteliti dengan tujuan untuk bisa menjelaskan dan memahami kasus tersebut (Stake, 2005).

### 3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif dibutuhkan informan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. Dalam memilih informan peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sebuah teknik yang mana memilih informan sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih individu yang dirasa paling sesuai dengan fenomena yang sedang dikaji.

Alasan memilih teknik *purposive sampling*, yaitu agar informan yang dipilih sesuai dengan tujuan atau fenomena yang ingin diteliti. *Purposive sampling* sendiri juga dapat dikatakan teknik dengan metode yang mudah dilakukan. Selain itu, *purposive sampling* berfokus kepada kedalaman informasi, bukan pada jumlah responden. Dengan ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dikarenakan telah memiliki kriteria yang dimiliki informan, sebagai berikut:

1. Pengurus atau anggota dari Partai Keadilan Sejahtera
2. Pengurus dari Bidang Kaderisasi dan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera

Untuk membedakan informan peneliti peneliti membedakan informan menjadi dua kategori, yaitu informan pelaku dan pengamat. Menurut Afrizal (2015), informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pengetahuannya, ataupun pikirannya. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain terkait suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Berikut merupakan informan penelitian:

**Tabel 1**  
**Informan Pelaku**

No.	Informan	Waktu	Jabatan
1.	UO	25 November 2024	Anggota
2.	EZ	6 Desember 2024	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
3.	AS	1 Januari 2025	Ketua Kaderisasi
4.	SY	3 Januari 2025	Kaderisasi, Pembina
5.	RW	13 Maret 2025	Anggota, Pembina
6.	DF	29 Maret 2025	Anggota, Pembina
7.	NR	25 April 2025	Anggota, Pembina

**Tabel 2**  
**Informan Pengamat**

No.	Informan	Waktu	Jabatan
1.	PA	23 Desember 2024	Anggota, Pembina
2.	RU	28 Januari 2025	Anggota, Pembina
3.	EA	18 Maret 2025	Anggota
4.	AS	13 Mei 2025	Anggota
5.	FM	13 Mei 2025	Anggota
6.	SZ	25 Mei 2025	Anggota
7.	FA	25 Mei 2025	Anggota
8.	AH	29 Mei 2025	Anggota

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Dari Nazir (1988), kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, catatan, literatur, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dengan studi kepustakaan peneliti akan mendapatkan banyak sumber informasi melalui buku-buku ataupun catatan, literatur yang ada. Kepustakaan juga dapat membantu dalam membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Bahan literatur yang akan menjadi sumber bacaan adalah yang berkaitan dengan praktik *ta'aruf*, dan Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri.

Buku-buku yang menjadi sumber bacaan untuk penelitian ini seperti buku dari Prof. Muhammad Iqbal dengan judul “Psikologi Pernikahan” dan buku dari Amar Risalah “Karena Menikah tidak Sebercanda Itu” yang mana dari buku ini peneliti mendapatkan gambaran dan dasar terkait pernikahan, serta tata cara praktik *ta'aruf*. Tambahan buku seperti “Dasar-Dasar Ilmu Politik” Mirriam Budiarto untuk menambah pemahaman terkait ilmu politik mengingat tema penelitian adalah partai politik. Terakhir adalah jurnal, artikel, ataupun skripsi yang membahas tentang partai politik, Partai Keadilan Sejahtera, dan praktik *ta'aruf*.

##### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan sesuai fenomena yang ingin diteliti. Wawancara

digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan atau langsung dari seseorang dengan bercakap-cakap berhadapan dengan seseorang (Koentjaraningrat, 1994: 129). Dengan wawancara kita bisa mendapatkan informasi detail karena itu dilakukan secara langsung dan dengan orang yang sesuai.

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan berbincang langsung dengan informan penelitian. Pertanyaan yang diajukan ketika wawancara itu seputar praktik *ta'aruf* yang ada di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti apa mekanismenya, setelah itu makna *ta'aruf* bagi PKS, dan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh anggota ketika *ta'aruf*, serta manfaat *ta'aruf* bagi PKS dan anggota.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan data penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang menjadi fokus penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata peristiwa atau interaksi sosial yang berlangsung sehingga bisa diperoleh data yang lebih alami dan kontekstual. Seperti yang dikemukakan Koentjaraningrat, 1994 : (108-109), dengan mata manusia memungkinkan kita bisa mengamati, melihat, memandang lingkungannya sehingga dapat memperoleh pengetahuan mengenai lingkungannya.

Observasi dilakukan pada lingkungan sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Padang, serta tempat-tempat lain yang menjadi tempat bertemunya para anggota, dan tempat anggota yang sedang menjalankan aktivitasnya. Pengamatan akan mencakup interaksi dari anggota partai, pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan melakukan observasi diharapkan adanya informasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai praktik *ta'aruf* di PKS.

d. Studi Dokumen

Selain dengan melakukan wawancara dan observasi, ditambah dengan studi kepustakaan sebagai bahan bacaan, dibutuhkan studi dokumen. Studi dokumen merupakan pengumpulan data dari dokumen tertulis, arsip, dokumen resmi, atau catatan organisasi. Studi dokumen bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung temuan penelitian yang telah ada. Beberapa studi dokumen yang didapat adalah AD/ART DPD PKS Kota Padang, Kurikulum Unit Pembinaan Anggota (UPA), dan berita dari media massa PKS.

**5. Analisis Data**

Ketika semua data lapangan telah dikumpulkan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan tahapan penelitian yang paling penting dan harus dilakukan, karena pada tahap inilah pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab dan simpulkan. Pada penelitian kualitatif analisis data merupakan proses pengelompokan dan pelacakan serta sistematis catatan lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara, studi literatur, dan bahan lain untuk mencari kebenaran dalam informasi yang didapatkan sehingga

nantinya didapatkan sebuah interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek atau hubungan antara satu dengan lainnya (Koentjaraningrat, 1994). Analisis data adalah proses mengolah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan. Tujuan dari analisis data adalah menjawab rumusan masalah dan menemukan pola, hubungan, atau makna yang tersembunyi di balik data.

Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (1992 : 20), sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang didapatkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data yang didapatkan hasil dari wawancara selama proses penelitian akan disusun dan dirapikan, serta dicocokkan. Telah didapatkan data-data hasil dari wawancara mendalam bersama informan, antara lain:

- Makna *ta'aruf* bagi PKS dan informan
- Mekanisme *ta'aruf* yang dijalankan
- Keterlibatan pihak ketika (*Murobbi/ah*)
- Pernikahan dan bermasyarakat
- Manfaat *ta'aruf* bagi PKS dan informan
- Dampak pernikahan terhadap aktivitas politik
- Pentingnya memilih pasangan yang se-fikrah
- Alasan memilih metode *ta'aruf* dibanding pacaran

Dari semua informasi tersebut, peneliti melakukan reduksi data dengan fokus utama, yaitu makna *ta'aruf*, mekanisme *ta'aruf*, dan manfaat *ta'aruf* dalam komunitas politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sisa data yang ada hanya sebagai pelengkap informasi, tidak dijadikan bahan utama analisis. Reduksi data sangat penting untuk memastikan data yang dianalisis tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh agar dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti catatan lapangan, grafik, jaringan, dan bagan. Data disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap situasi yang diteliti, serta membantu menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan. Penyajian data akan dibagi kedalam tiga topik pembahasan, yaitu mekanisme *ta'aruf*, makna *ta'aruf* dan manfaat *ta'aruf*. Untuk penjelasan lebih lengkapnya terdapat pada bab III dan IV skripsi.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan di mana peneliti menyimpulkan hasil dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang didapatkan adalah anggota PKS memaknai *ta'aruf* sebagai bentuk syariat Islam dan sarana untuk mendapatkan pasangan yang se-fikrah. Mekanisme *ta'aruf* terdapat tiga tahapan, yaitu *pra*

*ta'aruf*, masa *ta'aruf*, dan pasca *ta'aruf*. Terakhir *ta'aruf* memiliki beberapa manfaat, yaitu memudahkan anggota yang ingin menikah, mendapatkan pasangan yang memiliki tujuan yang sama, prosesnya terjaga, dan untuk PKS dapat menambah keluarga PKS itu sendiri. Untuk penarikan kesimpulan yang lebih lengkap ada pada bab V skripsi.

## 6. Proses Berjalannya Penelitian

Proses penelitian dimulai pada tanggal 11 bulan November 2024, yang diawali dengan memasukkan surat izin penelitian ke kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. Pada saat itu mendapatkan respon dan sambutan yang baik dari Wakil Sekretaris DPD PKS dan melakukan diskusi singkat. Setelah itu beliau akan memberikan nama dan nomor dari yang direkomendasikan untuk wawancara.

Selama penelitian tentu kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pada saat itu memang kondisinya sedang mengadakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) sehingga peneliti mendapatkan tantangan, yaitu menunggu konfirmasi dari PKS. Bisa dibilang cukup lama mendapatkan konfirmasi lanjutan dari PKS karena kita tahu PKS sendiri termasuk partai yang cukup besar dikenal di Sumatera Barat, terkhususnya Padang sehingga bisa jadi dikarenakan momen Pilkada PKS lebih berfokus kepada Pilkada. Nama-nama yang direkomendasikan baru didapat pada bulan Desember 2024.

Bersyukur peneliti memiliki kenalan yang merupakan bagian dari PKS dan juga terlibat dengan orang-orang PKS. Dengan begitu selagi menunggu nama-

nama rekomendasi dari PKS, peneliti bisa mendapatkan informasi melalui beberapa informan. Akhirnya peneliti mendapatkan 12 informan dengan tujuh informan yang telah memiliki pengalaman *ta'aruf*, dan delapan informan sebagai pengamat dan penambah data.

Untuk mendapatkan informasi melalui informan sudah dimulai dari bulan November 2024 sampai Mei 2025. Informan yang ditemui memiliki latar belakang yang berbeda dan beragam, baik dari segi usia, pengalaman, dan posisi di PKS sehingga peneliti memperoleh beragam pandangan yang bervariasi terkait praktik *ta'aruf*. Keberagaman ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami bagaimana *ta'aruf* dijalankan, serta makna dan manfaat yang dirasakan oleh masing-masing informan.

Dalam momen pertemuan dengan para informan, penulis bertemu dengan secara langsung atau *offline*, bahkan juga ada yang dilakukan secara *online* melalui media sosial seperti, *WhatsApp call* dan *personal chat WhatsApp*. Pertemuan secara langsung dilakukan di Masjid, rumah dari informan, dan tempat kerja informan. Pertemuan sendiri ada yang dilakukan dengan satu pertemuan, dan ada juga yang dua kali. Pertemuan dilakukan agar bisa menggali informasi lebih banyak dan lengkap.

Dari pertemuan tersebut, penulis bisa memahami terkait praktik *ta'aruf* yang dilakukan oleh PKS. PKS sendiri ternyata memberi perhatian penuh terhadap pernikahan anggotanya sehingga terdapat lembaga yang mengurus hal tersebut. Melalui penelitian ini ternyata peneliti bisa belajar banyak terkait sistem

pencarian jodoh atau berkenalan dengan calon pasangan dengan cara *ta'aruf*.  
dengan bertemunya informan peneliti ternyata secara tidak langsung belajar pra-  
nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

